



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 05);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran Belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan petunjuk dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB ini meliputi sub kegiatan yang terdiri atas:
 - a. ASB I-01A Pembinaan pada Masyarakat (Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan pada Masyarakat);
 - b. ASB I-01B Pembinaan pada Masyarakat (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan pada Masyarakat);
 - c. ASB I-01C Pembinaan pada Masyarakat (Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan pada Masyarakat);
 - d. ASB I-01D Pembinaan pada Masyarakat (Narasumber, Sewa Gedung dan Bantuan pada Masyarakat);
 - e. ASB I-01E Pembinaan pada Masyarakat (Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Bantuan pada Masyarakat);
 - f. ASB I-02A Pelatihan pada Masyarakat (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transportasi);
 - g. ASB I-02B Pelatihan pada Masyarakat (Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transportasi);
 - h. ASB I-02C Pelatihan pada Masyarakat (Narasumber, Sewa Gedung dan Bantuan Transportasi);
 - i. ASB I-03A Pelatihan pada Aparatur (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung);
 - j. ASB I-03B Pelatihan pada Aparatur (Narasumber dan Sewa Gedung);
 - k. ASB I-04 A Sosialisasi pada Masyarakat (Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transportasi);
 - l. ASB I-04B Sosialisasi pada Masyarakat (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transportasi);
 - m. ASB I-08B Sosialisasi pada Masyarakat (Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transportasi);
 - n. ASB I-05A Sosialisasi pada Aparatur (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung);
 - o. ASB I-05B Sosialisasi pada Aparatur (Narasumber dan Sewa Gedung);

- p. ASB I-06 Pelayanan pada Masyarakat;
 - q. ASB I-07 Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat;
 - r. ASB I-08 Penyusunan Dokumen Rutin Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - s. ASB I-09 Survey/Monitoring;
 - t. ASB I-10 Pelaksanaan Lomba;
 - u. ASB I-11 Forum Musyawarah;
 - v. ASB I-12 Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor;
 - w. ASB I-13 Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Gedung (dengan Menambah Nilai Aset/Belanja Modal);
 - x. ASB I-14 Administrasi Kegiatan Pembangunan Gedung;
 - y. ASB II-01 Pemeliharaan Rutin Bangunan dan Gedung Kantor Lingkup Kecamatan;
 - z. ASB II-02 Forum Komunikasi aKoordinasi Lingkup Kecamatan;
 - aa. ASB II-03 Penyusunan Dokumen Rutin Kecamatan;
 - bb. ASB II-04 Pemberdayaan Masyarakat;
 - cc. ASB II-05 Fasilitasi Kelurahan/Desa; dan
 - dd. ASB II-06 Sosialisasi.
- (2) Setiap sub kegiatan yang memiliki memiliki kemiripan pola sub kegiatan dan beban kerja yang setara dengan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENETAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan ASB di Daerah.
- (2) Penetapan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KOMPONEN

Pasal 6

Komponen ASB meliputi:

- a. definisi;
- b. ruang lingkup;
- c. formula; dan
- d. objek belanja yang disarankan.

Pasal 7

- (1) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penjelasan berdasarkan pendapat para ahli atau ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penjelasan operasional dari ASB yang dimaksud.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah rumusan standar pada setiap ASB.
- (4) Objek belanja yang disarankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah objek belanja yang seharusnya ada dalam setiap sub kegiatan yang mengacu pada ASB yang dimaksud.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ASB kegiatan suatu program yang dilaksanakan oleh SKPD belum termuat dalam Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- (2) Usul besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditelaah dan disetujui oleh TAPD.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan ASB di Daerah.
- (2) Perubahan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Sub kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 03 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2024

ANALISIS STANDAR BELANJA
 TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Spek	Ket	Koef	Satuan	Harga	Jumlah	Rekening	Kelompok
5.1.02.01.01.0001.1331	ASB I-01A: PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Pada Masyarakat)				Masyarakat	Nilai ASB	236.720		3
5.1.02.01.01.0001.1332	ASB I-01B: PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Pada Masyarakat)				Masyarakat	Nilai ASB	279.456		3
5.1.02.01.01.0001.1333	ASB I-01C: PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Pada Masyarakat)				Masyarakat	Nilai ASB	307.736		3
5.1.02.01.01.0001.1334	ASB I-01D: PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Narasumber, Sewa Gedung dan Bantuan Pada Masyarakat)				Masyarakat	Nilai ASB	534.636		3
5.1.02.01.01.0001.1335	ASB I-01E: PEMBINAAN PADA MASYARAKAT (Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Bantuan Pada Masyarakat)				Masyarakat	Nilai ASB	443.018		3

Kode	Uraian	Spek	Ket	Koef	Satuan	Harga	Jumlah	Rekening	Kelompok
5.1.02.01.01. 0001.1336	ASB I-02A: PELATIHAN PADA MASYARAKAT (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)				Orang Hari	Nilai ASB	320.956		3
5.1.02.01.01. 0001.1337	ASB I-02B: PELATIHAN PADA MASYARAKAT (Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)				Orang Hari	Nilai ASB	326,337		3
5.1.02.01.01. 0001.1338	ASB I-02C: PELATIHAN PADA MASYARAKAT (Narasumber, Sewa Gedung dan Bantuan Transport)				Orang Hari	Nilai ASB	327.391		3
5.1.02.01.01. 0001.1339	ASB I-03A: PELATIHAN PADA APARATUR (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung)				Orang Hari	Nilai ASB	675.430		3
5.1.02.01.01. 0001.1340	ASB I-03B: PELATIHAN PADA APARATUR (Narasumber dan Sewa Gedung)				Orang Hari	Nilai ASB	695.074		3
5.1.02.01.01. 0001.1341	ASB I-04 A: SOSIALISASI PADA MASYARAKAT (Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)				Orang Hari	Nilai ASB	82.038		3
5.1.02.01.01. 0001.1342	ASB I-04B: SOSIALISASI PADA MASYARAKAT (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)				Orang Hari	Nilai ASB	120.159		3
5.1.02.01.01. 0001.1343	ASB I-04C: SOSIALISASI PADA MASYARAKAT (Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)				Orang Hari	Nilai ASB	325.998		3

Kode	Uraian	Spek	Ket	Koef	Satuan	Harga	Jumlah	Rekening	Kelompok
5.1.02.01.01.0001.1344	ASB I-05A: SOSIALISASI PADA APARATUR (Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung)				Orang Hari	Nilai ASB	600,384		3
5.1.02.01.01.0001.1345	ASB I-05B: SOSIALISASI PADA APARATUR (Narasumber dan Sewa Gedung)				Orang Hari	Nilai ASB	620.016		3
5.1.02.01.01.0001.1346	ASB I-06: PELAYANAN PADA MASYARAKAT				Masyarakat	Nilai ASB	440.751		3
5.1.02.01.01.0001.1347	ASB I-07: PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT				Masyarakat	Nilai ASB	6.116		3
5.1.02.01.01.001.1348	ASB I-08: PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN OPD				Dokumen	Nilai ASB	3.576.621		3
5.1.02.01.01.001.1349	ASB I-09: SURVEY/MONITORING				Orang Hari	Nilai ASB	645.575		3
5.1.02.01.01.001.1350	ASB I-10: PELAKSANAAN LOMBA				Orang	Nilai ASB	368.966		3
5.1.02.01.01.001.1351	ASB I-11: FORUM MUSYAWARAH				Orang Hari	Nilai ASB	174.435		3
5.1.02.01.01.001.1352	ASB I-12: PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR				M2	Nilai ASB	19.035		3
5.1.02.01.01.001.1353	ASB I-13: ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG (Dengan Menambah Nilai Aset/Belanja Modal)				Nilai Belanja Modal	Nilai ASB	0,172		3
5.1.02.01.01.001.1354	ASB I-14: ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG				Nilai Belanja Modal	Nilai ASB	0,144		3
5.1.02.01.01.001.1355	ASB II-01: PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR LINGKUP KECAMATAN				M2	Nilai ASB	59.945		3
5.1.02.01.01.0	ASB II-02:				Orang Hari	Nilai ASB	86.622		3

Kode	Uraian	Spek	Ket	Koef	Satuan	Harga	Jumlah	Rekening	Kelompok
001.1356	FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP KECAMATAN								
5.1.02.01.01.0 001.1357	ASB II-03: PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN KECAMATAN				Dokumen	Nilai ASB	1.309.299		3
5.1.02.01.01.0 001.1358	ASB II-04: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				Dokumen	Nilai ASB	135.924		3
5.1.02.01.01.0 001.1359	ASB II-05: FASILITASI KELURAHAN/DESA				Desa/Kelura han	Nilai ASB	750.146		3
5.1.02.01.01.0 001.1360	ASB II-06: SOSIALISASI				Orang Hari	Nilai ASB	59.796		3

ASB I-01**PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/FASILITASI PADA MASYARAKAT**

Definisi : Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
3	Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
4	Dinas Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Dinas Perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6	Dinas Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
12	Dinas Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Standardisasi Organisasi Keolahragaan
20	Dinas Pemuda dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
	Olahraga	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Pada Jenis ASB ini terdiri dari beberapa ASB yaitu:

ASB I-01A

PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/FASILITASI PADA MASYARAKAT

(Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Pada Masyarakat)

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 236.720/\text{Masyarakat Yang Dibina}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	7%	14%
Belanja Jasa Kantor	0%	14%	22%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	7%	17%
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0%	72%	71%
Jumlah		100%	

ASB I-01B

PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/FASILITASI PADA MASYARAKAT

(Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Pada Masyarakat)

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 279.456/\text{Masyarakat Yang Dibina}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Pegawai	0%	1%	1%
Belanja Barang Pakai Habis	0%	32%	63%
Belanja Jasa Kantor	0%	11%	23%

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Sewa Tanah	0%	1%	1%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	2%	4%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	6%	6%
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0%	1%	2%
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0%	18%	25%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	10%	10%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	9%	16%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	9%	21%
Jumlah		100%	

ASB I-01C

PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/FASILITASI PADA MASYARAKAT

(Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Pada Masyarakat)

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 307.736/\text{Masyarakat Yang Dibina}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	28%	58%
Belanja Jasa Kantor	0%	40%	100%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	10%	10%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	22%	57%
Jumlah		100%	

ASB I-01D**PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/FASILITASI PADA MASYARAKAT
(Narasumber dan Sewa Gedung dan Bantuan Pada Masyarakat)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 534.636/\text{Masyarakat Yang Dibina}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	26%	51%
Belanja Jasa Kantor	0%	14%	30%
Belanja Sewa Tanah	0%	5%	15%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	2%	3%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	1%	2%
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0%	1%	1%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0%	3%	4%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	1%	1%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	3%	5%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	7%	19%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	3%	4%
Belanja Hibah	0%	34%	34%
Jumlah		100%	

ASB I-01E**PEMBINAAN/PEMBERDAYAAN/FASILITASI PADA MASYARAKAT
(Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Bantuan Pada Masyarakat)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pembinaan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa dan juga ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 443.018/\text{Masyarakat Yang Dibina}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	22%	38%
Belanja Jasa Kantor	0%	13%	25%
Belanja Sewa Tanah	0%	4%	7%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	1%	2%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	35%	80%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	5%	9%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	10%	18%
Belanja Hibah	0%	10%	21%
Jumlah		100%	

ASB I-02

PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT

Definisi : Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Sekretariat Daerah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Sekretariat Daerah	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.	Sekretariat Daerah	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Dinas Tenaga Kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
5.	Dinas Tenaga Kerja	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
6.	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
7.	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

No.	SKPD	Sub Kegiatan
8.	Dinas Sosial	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
9.	Dinas Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
10.	Dinas Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
11.	Dinas Perindustrian	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
12.	Dinas Perindustrian	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
13.	Dinas Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
15.	Dinas Pendidikan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
18.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
20.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
23.	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
25.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

No.	SKPD	Sub Kegiatan
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pada Jenis ASB ini terdiri dari beberapa ASB yaitu:

ASB I-02A:

PELATIHAN PADA MASYARAKAT

(Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 320.956/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	43%	100%
Belanja Jasa Kantor	0%	57%	100%
Jumlah		100%	

ASB I-02B:

PELATIHAN PADA MASYARAKAT

(Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 326.337/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	22%	37%
Belanja Jasa Kantor	0%	60%	100%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	11%	14%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	5%	9%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	2%	3%
Jumlah		100%	

**ASB I-02C:
 PELATIHAN PADA MASYARAKAT
 (Narasumber, Sewa Gedung dan Bantuan Transport)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 327.391 / \text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	31%	59%
Belanja Jasa Kantor	0%	30%	40%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	9%	9%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	3%	3%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	27%	28%
Jumlah		100%	

**ASB I-03
 PELATIHAN KEPADA APARATUR**

Definisi : Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Inspektorat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.	Dinas Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
7.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
8.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah

		Kabupaten/Kota
9.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
10.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pada Jenis ASB ini terdiri dari beberapa ASB yaitu:

**ASB I-03A:
PELATIHAN PADA APARATUR
(Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 675.430/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	65%	98%
Belanja Jasa Kantor	0%	35%	54%
Jumlah		100%	

**ASB I-03B:
PELATIHAN PADA APARATUR
(Narasumber dan Sewa Gedung)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelatihan yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga menyewa gedung ruang untuk pertemuan

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 695.074/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Jasa Kantor	0%	62%	100%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	38%	78%
Jumlah		100%	

ASB I-04:
SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2.	Dinas Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja
3.	Dinas Tenaga Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
4.	Dinas Tenaga Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja
5.	Dinas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
6.	Dinas Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
7.	Dinas Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
8.	Dinas Pertanian	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
9.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
10.	Dinas Perindustrian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
11.	Dinas Perindustrian	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
12.	Dinas Perindustrian	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
13.	Dinas Perikanan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
14.	Dinas Perhubungan	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
16.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
17.	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi

No.	SKPD	Sub Kegiatan
	Keluarga Berencana	Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
19.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
20.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
21.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Dana BOP PAUD
22.	Dinas Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
25.	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
26.	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
27.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
28.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
29.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
30.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
31.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
32.	Badan Pendapatan Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

No.	SKPD	Sub Kegiatan
		Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
35.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
36.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Jenis ASB ini terdiri dari beberapa ASB yaitu:

**ASB I-04 A:
SOSIALISASI PADA MASYARAKAT
(Tanpa Narasumber, Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 82.038/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	88%	100%
Belanja Jasa Kantor	0%	12%	12%
Jumlah		100%	

**ASB I-04B:
SOSIALISASI PADA MASYARAKAT
(Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 120.159/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	61%	100%
Belanja Jasa Kantor	0%	39%	90%
Jumlah		100%	

**ASB I-04C:
SOSIALISASI PADA MASYARAKAT
(Narasumber dan Sewa Gedung dan Tanpa Bantuan Transport)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga menyewa gedung ruang untuk pertemuan dan juga tidak ada bantuan transportasi pada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 325.998 / \text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	48%	92%
Belanja Jasa Kantor	0%	45%	91%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	7%	10%
Jumlah		100%	

**ASB I-05:
SOSIALISASI KEPADA APARATUR**

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Sekretariat Daerah	Penataan Administrasi Pemerintahan
2.	Sekretariat Daerah	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3.	Sekretariat Daerah	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4.	Dinas Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelayanan Informasi Publik
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pada Jenis ASB ini terdiri dari beberapa ASB yaitu:

**ASB I-05A:
SOSIALISASI PADA APARATUR
(Narasumber dan Tanpa Sewa Gedung)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga tidak menyewa gedung ruang untuk pertemuan dalam arti OPD dimungkinkan mempunyai gedung yang tidak memerlukan biaya sewa.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 600.384 / \text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	52%	82%
Belanja Jasa Kantor	0%	48%	92%
Jumlah		100%	

**ASB I-05B:
SOSIALISASI PADA APARATUR
(Narasumber dan Sewa Gedung)**

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan narasumber dan juga menyewa gedung ruang untuk pertemuan.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 620.016 / \text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	35%	58%
Belanja Jasa Kantor	0%	64%	100%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	1%	2%
Jumlah		100%	

**ASB I-06:
PELAYANAN PADA MASYARAKAT**

Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Dengan kata lain dalam hubungan pemerintahan terkandung makna adanya organisasi yang memerintah dan masyarakat yang diperintah.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standa
2.	Dinas Tenaga Kerja	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
3.	Dinas Tenaga Kerja	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4.	Dinas Sosial	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
5.	Dinas Sosial	Rujukan Anak-Anak Terlantar
6.	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
8.	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
9.	Dinas Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
10.	Dinas Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
11.	Dinas Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
12.	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
13.	Dinas Sosial	Pemberian Layanan Rujukan
14.	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
15.	Dinas Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
16.	Dinas Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
17.	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
18.	Dinas Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
19.	Dinas Pertanian	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
20.	Dinas Perindustrian	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
21.	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
22.	Dinas Perhubungan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
23.	Dinas Perhubungan	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
24.	Dinas Perdagangan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
25.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
26.	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
28.	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
29.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
30.	Dinas Kesehatan	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
32.	Badan Pendapatan Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
33.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
34.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

Ruang Lingkup Pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pemberian pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 440.751 / \text{Jumlah Masyarakat}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	20%	37%
Belanja Jasa Kantor	0%	63%	100%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	17%	26%
Jumlah		100%	

ASB I-07**PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT**

DEFINISI :

Hodgetts dan Casio (Azwar, 1994: 43) menyatakan bahwa; Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (publik health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
2.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
3.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
5.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
6.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
7.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
14.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
16.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
17.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
18.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
19.	Dinas Kesehatan	Operasional Pelayanan Puskesmas
20.	Dinas Kesehatan	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Ruang Lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pemberian pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara langsung.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 6.116/\text{Jumlah Masyarakat}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	35%	78%
Belanja Jasa Kantor	0%	20%	54%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0%	11%	14%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0%	2%	3%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	32%	47%
Jumlah		100%	

ASB I-08

PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN

Definisi : Penyusunan dokumen rutin ini adalah sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang hasil keluarannya adalah dokumen yang setiap tahun dilaksanakan seperti dokumen keuangan, dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi.

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Sekretariat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.	Sekretariat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.	Sekretariat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.	Sekretariat DPRD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.	Inspektorat	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
9.	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.	Inspektorat	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
11.	Inspektorat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No.	SKPD	Sub Kegiatan
13.	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
14.	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
16.	Inspektorat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17.	Inspektorat	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.	Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
19.	Dinas Tenaga Kerja	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
20.	Dinas Sosial	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
21.	Dinas Sosial	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22.	Dinas Pertanian	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
23.	Dinas Pertanian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
24.	Dinas Pertanian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
27.	Dinas Perindustrian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
28.	Dinas Perindustrian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
29.	Dinas Perindustrian	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.	Dinas Perikanan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
31.	Dinas Perikanan	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
32.	Dinas Perikanan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
33.	Dinas Perhubungan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
34.	Dinas Perhubungan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
35.	Dinas Perhubungan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
36.	Dinas Perdagangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
37.	Dinas Perdagangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
38.	Dinas Perdagangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
39.	Dinas Pengendalian Penduduk dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No.	SKPD	Sub Kegiatan
	Keluarga Berencana	
40.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
41.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
42.	Dinas Pendidikan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
43.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
44.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
45.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
46.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
47.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
48.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
49.	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
50.	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
51.	Dinas Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
52.	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
53.	Dinas Ketahanan Pangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
54.	Dinas Ketahanan Pangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55.	Dinas Kesehatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
56.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
57.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
58.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
59.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
60.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
61.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
62.	Badan Perencanaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
	Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Akhir Tahun SKPD
63.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
64.	Badan Pendapatan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
65.	Badan Pendapatan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
66.	Badan Pendapatan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
67.	Badan Pendapatan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
68.	Badan Pendapatan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
69.	Badan Pendapatan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
70.	Badan Pendapatan Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
71.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
72.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
73.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
74.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
75.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
76.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
77.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
78.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
79.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
80.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
81.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
82.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

No.	SKPD	Sub Kegiatan
83.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
84.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
85.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
86.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
87.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
88.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
89.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
90.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Ruang Lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya menyusun dokumen.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 3.576.651 / \text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	14%	25%
Belanja Jasa Kantor	0%	86%	100%
Jumlah		100%	

ASB I-09: SURVEY/MONITORING

Definisi :

- a) Pengertian monitoring adalah proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program. Monitoring bertujuan untuk memantau perubahan dan fokus pada proses dan keluaran. Melibatkan monitoring dapat dilakukan dengan perhitungan atas apa yang dilakukan.
- b) Menurut Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015), survey sebagai salah satu penelitian yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya penelitian survey menggunakan kuesioner sebagai alat pengambil data.

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Sekretariat Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
2.	Sekretariat Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
3.	Sekretariat Daerah	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4.	Sekretariat Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
7.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
8.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
9.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
11.	Inspektorat	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
12.	Inspektorat	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
13.	Inspektorat	Reviu Laporan Kinerja
14.	Inspektorat	Reviu Laporan Keuangan
15.	Inspektorat	Pengawasan Desa
16.	Inspektorat	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
17.	Dinas Pertanian	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
18.	Dinas Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosi
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
21.	Dinas Perindustrian	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
22.	Dinas Perikanan	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
23.	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
24.	Dinas Perhubungan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
25.	Dinas Perhubungan	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas

No.	SKPD	Sub Kegiatan
		Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
26.	Dinas Perhubungan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
27.	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
28.	Dinas Perdagangan	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
29.	Dinas Perdagangan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
30.	Dinas Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
31.	Dinas Perdagangan	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
32.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
33.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
34.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
35.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
36.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
37.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
38.	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
39.	Dinas Lingkungan Hidup	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
40.	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
41.	Dinas Ketahanan Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
42.	Dinas Ketahanan Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
43.	Dinas Ketahanan Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
44.	Dinas Kesehatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
45.	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
46.	Badan Pendapatan Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
47.	Badan Pendapatan Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah
48.	Badan Pendapatan Daerah	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
49.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
50.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
51.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
52.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
53.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

RUANG LINGKUP :

OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya mencari data di seluruh wilayah Kabupaten Tapin yang terkait dengan objek yang akan dilakukan kajian atau analisis terhadap data tersebut.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 645.575/\text{Jumlah Orang dan Hari melaksanakan survey/monitoring}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	43%	93%
Belanja Jasa Kantor	0%	57%	100%
Jumlah		100%	

**ASB I-10:
PELAKSANAAN LOMBA**

DEFINISI :

- adu kecepatan (berlari, berenang, dan sebagainya)
- adu keterampilan (Ketangkasan, kekuatan dan sebagainya)

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Seleksi Atlet Daerah

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat pelaksanaan lomba dimana OPD sebagai pelaksana.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 368.966 / \text{Jumlah Peserta Lomba}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	34%	62%
Belanja Jasa Kantor	0%	9%	19%
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11%	19%	11%
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3%	3%	3%
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	9%	17%	9%
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	8%	14%	8%

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Lain/Masyarakat			
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26%	54%	26%
Jumlah		100%	

**ASB I-11:
FORUM MUSYAWARAH**

DEFINISI :

Forum Musyawarah adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan saling berbagi informasi dan membahas suatu permasalahan.

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
2.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
3.	Dinas Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
4.	Dinas Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Keci
5.	Dinas Perhubungan	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
6.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8.	Dinas Ketahanan Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
9.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
10.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
11.	Badan Pendapatan	Penagihan Pajak Daerah

No.	SKPD	Sub Kegiatan
	Daerah	
12.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
13.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
17.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat atau aparatur terkait untuk mendiskusikan suatu topik yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 174.435/\text{Jumlah Orang dan Hari melaksanakan survey/monitoring}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	27%	44%
Belanja Jasa Kantor	0%	73%	100%
Jumlah		100%	

ASB I-12:

PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR

DEFINISI :

Pemeliharaan gedung/bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Inspektorat	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Dinas Sosial	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.	Dinas Perhubungan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.	Dinas Ketahanan Pangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No.	SKPD	Sub Kegiatan
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang sifatnya tidak menambah nilai aset hanya lebih mempertahankan nilai aset tersebut.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 31.035/\text{Jumlah Luasan Bangunan yang dipelihara (M}^2\text{)}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	71%	100%
Belanja Jasa Kantor	0%	29%	68%
Jumlah		100%	

**ASB I-13:
ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG
(Dengan Menambah Nilai Aset/Belanja Modal)**

DEFINISI :

Dalam ASB ini adalah merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung dimana dalam pelaksanaannya terdapat penambahan terhadap Aset yang akan direhabilitasi yaitu berbentuk Belanja Modal.

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Kegiatan
1.	Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Dinas Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Dinas Perhubungan	
4.	Dinas Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
5.	Dinas Perdagangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
9.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
10.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
11.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

No.	SKPD	Kegiatan
12.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
13.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
14.	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Ruang lingkup pada ASB ini berbentuk Dukungan Administrasi dari Pekerjaan Rehabilitasi Gedung.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 0,172/\text{Nilai Belanja Modal (Rp)}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Pegawai	0%	16%	34%
Belanja Barang Pakai Habis	0%	24%	75%
Belanja Jasa Kantor	0%	15%	34%
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0%	45%	50%
Jumlah		100%	

ASB I-14: ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG

DEFINISI :

Dalam ASB ini adalah merupakan bagian dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Gedung dimana dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan Pengadaan Gedung yaitu berbentuk Belanja Modal.

Data yang dianalisis dalam ASB ini adalah :

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Dinas Pertanian	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
5.	Dinas Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru
6.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
7.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

No.	SKPD	Sub Kegiatan
8.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
9.	Dinas Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
12.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas
13.	Dinas Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Ruang lingkup pada ASB ini berbentuk Dukungan Administrasi dari Pekerjaan Pembangunan Gedung.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 0,144/\text{Nilai Belanja Modal (Rp)}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Pegawai	0%	10%	28%
Belanja Barang Pakai Habis	0%	11%	27%
Belanja Jasa Kantor	0%	37%	90%
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0%	42%	54%
Jumlah		100%	

**ASB II-01:
PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN DAN GEDUNG KANTOR LINGKUP
KECAMATAN**

DEFINISI :

Pemeliharaan gedung/bangunan merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Bakarangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Kecamatan Binuang	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.	Kecamatan Bungur	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.	Kecamatan Candi Laras Utara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.	Kecamatan Hatungun	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.	Kecamatan Piani	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.	Kecamatan Salam Babaris	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9.	Kecamatan Tapin Selatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.	Kecamatan Tapin Tengah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.	Kecamatan Tapin Utara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor yang sifatnya tidak menambah nilai aset hanya lebih mempertahankan nilai aset tersebut.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 59.945/\text{Luasan Bangunan yang dipelihara}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0%	100%	100%
Jumlah		100%	

ASB II-02: FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI LINGKUP KECAMATAN

DEFINISI :

Forum Komunikasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan saing berbagi informasi dan membahas suatu permasalahan.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2.	Kecamatan Binuang	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.	Kecamatan Binuang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4.	Kecamatan Bungur	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.	Kecamatan Bungur	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
6.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
		di Desa
7.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
8.	Kecamatan Candi Laras Utara	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.	Kecamatan Hatungun	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
11.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.	Kecamatan Lokpaikat	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.	Kecamatan Piani	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
14.	Kecamatan Piani	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.	Kecamatan Piani	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
16.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
17.	Kecamatan Salam Babaris	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
18.	Kecamatan Tapin Selatan	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
19.	Kecamatan Tapin Selatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
20.	Kecamatan Tapin Selatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
21.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
22.	Kecamatan Tapin Tengah	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
23.	Kecamatan Tapin Utara	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
24.	Kecamatan Tapin Utara	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
25.	Kecamatan Tapin Utara	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mendiskusikan suatu topik yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 86.622/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	58%	90%
Belanja Jasa Kantor	0%	42%	62%
Jumlah		100%	

**ASB II-03:
PENYUSUNAN DOKUMEN RUTIN KECAMATAN**

DEFINISI :

Penyusunan dokumen rutin ini adalah sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan yang hasil keluarannya adalah dokumen yang setiap tahun dilaksanakan seperti dokumen keuangan, dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7.	Kecamatan Bakarangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.	Kecamatan Binuang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.	Kecamatan Binuang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.	Kecamatan Binuang	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.	Kecamatan Bungur	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
12.	Kecamatan Bungur	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
13.	Kecamatan Bungur	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
14.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
16.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No.	SKPD	Sub Kegiatan
17.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
18.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
19.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
20.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
21.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
22.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
23.	Kecamatan Candi Laras Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
25.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
26.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
27.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
28.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
29.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
30.	Kecamatan Hatungun	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
32.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
33.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
34.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
35.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
36.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
37.	Kecamatan Lokpaikat	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
38.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
39.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
40.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
41.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
42.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
43.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

No.	SKPD	Sub Kegiatan
44.	Kecamatan Piani	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
45.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
46.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
47.	Kecamatan Salam Babaris	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
48.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
49.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
50.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
51.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
52.	Kecamatan Salam Babaris	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
53.	Kecamatan Tapin Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
54.	Kecamatan Tapin Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
55.	Kecamatan Tapin Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
56.	Kecamatan Tapin Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
57.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
58.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
59.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
60.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
61.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
62.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
63.	Kecamatan Tapin Tengah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
64.	Kecamatan Tapin Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
65.	Kecamatan Tapin Utara	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
66.	Kecamatan Tapin Utara	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
67.	Kecamatan Tapin Utara	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya menyusun dokumen.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 1.309.299 / \text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	100%	100%
Jumlah		100%	

ASB II-04: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DEFINISI

Pemberdayaan atau bahasa inggris yaitu “empowerment” dapat diartikan sebagai proses memberikan kesempatan kepada seseorang atau lebih untuk berpikir, berbicara, bertindak, berkeputusan terkait dengan pekerjaannya, sehingga pekerjaan lebih cepat, singkat, dan mudah.

Adapun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan memiliki arti proses, cara, dan perbuatan memberdayakan.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Bakarangan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.	Kecamatan Binuang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.	Kecamatan Binuang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4.	Kecamatan Binuang	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
5.	Kecamatan Bungur	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.	Kecamatan Candi Laras Utara	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.	Kecamatan Hatungun	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
9.	Kecamatan Lokpaikat	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
10.	Kecamatan Lokpaikat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
11.	Kecamatan Piani	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.	Kecamatan Salam Babaris	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13.	Kecamatan Salam Babaris	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
14.	Kecamatan Tapin Selatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.	Kecamatan Tapin Selatan Kelurahan Tambarangan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
16.	Kecamatan Tapin Tengah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17.	Kecamatan Tapin Utara	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
18.	Kecamatan Tapin Utara	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 135.924 / \text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	62%	82%
Belanja Jasa Kantor	0%	23%	48%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0%	3%	4%
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0%	12%	22%
Jumlah		100%	

**ASB II-05:
FASILITASI KELURAHAN/DESA**

DEFINISI

Fasilitasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk membantu kelompok atau individu dalam mencapai tujuan mereka. Fasilitasi mengacu pada proses mengelola dan mendukung kelompok atau individu dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang efektif dan efisien.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Bakarangan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2.	Kecamatan Bakarangan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3.	Kecamatan Bakarangan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
4.	Kecamatan Binuang	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
5.	Kecamatan Binuang	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.	Kecamatan Binuang	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
7.	Kecamatan Binuang	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
8.	Kecamatan Bungur	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
9.	Kecamatan Bungur	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.	Kecamatan Bungur	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
11.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
12.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
13.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
15.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
16.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
17.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.	Kecamatan Candi Laras Utara	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
19.	Kecamatan Candi Laras Utara	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
20.	Kecamatan Candi Laras	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan

No.	SKPD	Sub Kegiatan
	Utara	Pendayagunaan Aset Desa
21.	Kecamatan Candi Laras Utara	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
22.	Kecamatan Candi Laras Utara	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
23.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
24.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
25.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
26.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
27.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
28.	Kecamatan Hatungun	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
29.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
30.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
32.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
33.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
34.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
35.	Kecamatan Piani	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
36.	Kecamatan Piani	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
37.	Kecamatan Piani	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
38.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
39.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
40.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
41.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
42.	Kecamatan Salam Babaris	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
43.	Kecamatan Tapin Selatan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
44.	Kecamatan Tapin Selatan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

No.	SKPD	Sub Kegiatan
45.	Kecamatan Tapin Selatan	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
46.	Kecamatan Tapin Tengah	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
47.	Kecamatan Tapin Tengah	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
48.	Kecamatan Tapin Tengah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
49.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
50.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
51.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
52.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang sifatnya memberikan fasilitasi kepada Desa dan juga kelurahan.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 750.146/\text{Jumlah Desa atau Kelurahan}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	42%	80%
Belanja Jasa Kantor	0%	58%	84%
Jumlah		100%	

ASB II-06: SOSIALISASI

DEFINISI :

Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi (2004) karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu tersebut berada.

Data Yang dianalisis dalam ASB ini adalah:

No.	SKPD	Sub Kegiatan
1.	Kecamatan Bakarangan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
2.	Kecamatan Bungur	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3.	Kecamatan Bungur	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No.	SKPD	Sub Kegiatan
4.	Kecamatan Bungur	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
5.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
6.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.	Kecamatan Candi Laras Selatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
8.	Kecamatan Candi Laras Utara	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
9.	Kecamatan Candi Laras Utara	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
11.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
12.	Kecamatan Hatungun	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
13.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
14.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
15.	Kecamatan Lokpaikat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
16.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
17.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
18.	Kecamatan Salam Babaris	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
19.	Kecamatan Tapin Selatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
20.	Kecamatan Tapin Selatan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
21.	Kecamatan Tapin Selatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
22.	Kecamatan Tapin Tengah	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
23.	Kecamatan Tapin Tengah	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
24.	Kecamatan Tapin Tengah	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
25.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
26.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No.	SKPD	Sub Kegiatan
27.	Kecamatan Tapin Utara	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Ruang lingkup pada ASB ini adalah OPD melaksanakan sub kegiatan yang bersifat sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat.

Berikut adalah Formula ASB adalah $Y = 59.796/\text{Jumlah Orang dan Hari}$, sedangkan objek belanja yang digunakan dalam pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Objek Belanja	Nilai Minimal	Nilai Rerata	Nilai Maksimal
Belanja Barang Pakai Habis	0%	83%	100%
Belanja Jasa Kantor	0%	17%	34%
Jumlah		100%	

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014